

ABSTRAK

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
KONSENTRASI PUBLIC RELATIONS**

**Wulan Ruditasari
20120530110**

Wacana Konflik Internal Keraton Yogyakarta (Analisis Wacana Kritis Keberpihakan Harian Kedaulatan Rakyat (KR) Dan Tribun Jogja Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Bulan September 2017)

Tahun Skripsi : 2019 + 92 Halaman

Daftar Pustaka : 15 Buku + 14 Jurnal + 8 Koran

Yogyakarta merupakan daerah istimewa dengan keunikan dalam hal kepemimpinan. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, Yogyakarta tidak menggunakan sistem pemilihan umum untuk menentukan calon gubernur. Calon gubernur DIY ditentukan dengan cara penetapan secara tradisional mengikuti hukum tradisional Kraton Yogyakarta. Kepemimpinan ditentukan berdasarkan garis keturunan laki-laki dalam kerajaan. Masalah timbul karena Sultan Hamengkubuwono X yang saat ini menjabat sebagai gubernur DIY tidak memiliki anak laki-laki.

Pemberian gelar Mangkubumi kepada putri sulung Sultan menimbulkan konflik dengan para adik Sultan. Dalam sejarah Kraton Yogyakarta, siapapun yang diberikan gelar Mangkubumi merupakan pertanda sebagai pewaris tahta selanjutnya. Untuk membuka peluang perempuan naik tahta, penghapusan frasa “istri” dalam persyaratan calon gubernur dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil putusan ini menimbulkan beragam reaksi baik setuju maupun penolakan. Wacana ini tentu tidak luput dari media massa.

Penelitian ini meneliti bagaimana wacana konflik internal Kraton Yogyakarta tersebut ditampilkan dalam pemberitaan surat kabar harian lokal Kedaulatan Rakyat (KR) dan Tribun Jogja. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan kecenderungan dari kedua surat kabar harian. Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) lebih menyoroti aspek hukum positif yang mendukung wacana Sultan perempuan. Sedangkan Tribun Jogja lebih menyoroti aspek persyaratan tradisional yang tidak memungkinkan perempuan menjadi Raja. Sehingga, Penolakan adik-adik Sultan menjadi lebih relevan.

Kata Kunci : Analisis Wacana Kritis, Keberpihakan Media, Konflik Kraton

ABSTRACT

**MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF YOGYAKARTA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
COMMUNICATION DEPARTMENT
PUBLIC RELATIONS CONSENTRATION**

**Wulan Ruditasari
20120530110**

**Internal Conflict of Yogyakarta Palace Discourse (Critical Discourse Analysis
Partisanship of Kedaulan Rakyat (KR) Dan Tribun Jogja After an Issue of
Constitutional Court Number 88/PUU-XIV/2016 in September 2017)**

Year of Research: 2019 + 92 Pages

References: 15 books + 14 journals + 8 news paper

Yogyakarta is special region kind of leadership. Different from other province in Indonesia, Yogyakarta does not conduct general election for governor. The next candidate chosen by Yogyakarta Palace based on hereditary refers to male lineage. The conflict arise since the current Sultan has no son.

The eldest daughter of Sultan was given a peerage “Mangkubumi” which cause conflict with Sultan’s brothers. According to history, whoever got thus peerage going to be the next heir. Disclose the opportunity of a woman to be the next heir, Constitutional Court grant deletion of the phrase “wife” from one of requirements as candidate to be. This issue raises various reactions. Mass media surely catch this discourse.

This research analyzing how internal conflict of Yogyakarta Palace being written on the local news of Kedaulatan Rakyat (KR) and Tribun Jogja. This research used critical discourse analysis Norman Fairclough. The results represent the partisanship from both of the newspapers. Kedaulatn Rakyat (KR) tend to write the news more into the positive law to disclose female Sultan. While Tribun Jogja tend to write the news more into traditional requirements which has no clue for woman to be a King which made the rejections from Sultan’s brothers more relevant.

Key Words: Critical Discourse Analysis, Media Partisanship, Kraton Conflict